



## PEMBERDAYAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHU DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Guntur Christian Putra<sup>1)</sup>, Titin Rohayatin<sup>2)</sup>, Agustina Setiawan<sup>3)</sup>

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat” yang memiliki tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dengan IKM atau bisa disebut dengan Industri khusus-nya industri tahu dalam perkembangan perekonomian di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi lapangan. Data penelitian di analisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IKM atau industri tahu di Kabupaten Bandung Barat sudah berjalan dengan baik dan tersusun secara bertahap baik dari segi permodalan, pelegalan hak cipta serta sarana dan pra sarana dalam mewujudkan peningkatan perekonomian industri tahu di Kabupaten Bandung Barat walaupun tidak semua pelaku industri yang mengetahui atau mendapatkan akses mudah dan perlu waktu karena kurangnya komunikasi antara pelaku industri dengan pemerintah daerah yang menyebabkan terlambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat, Perekonomian

### Abstract

*This research entitled "Empowerment of the Department of Industry and Trade in the Context of Developing the Tofu Industry in West Bandung Regency" which has the aim of knowing, describing and analyzing the synergy of the Department of Industry and Trade of West Bandung Regency with SMEs or what could be called Industry, specifically the tofu industry in development economy in the region. This research is a qualitative descriptive research with data collection techniques in the form of interviews and field studies. Research data was analyzed using qualitative descriptive research methods. The research results show that the empowerment of the Department of Industry and Trade with SMEs or the tofu industry in West Bandung Regency has been going well and is structured in stages both in terms of capital, copyright legalization as well as facilities and infrastructure in realizing an economic*

*increase in the tofu industry in West Bandung Regency, although Not all industry players know or have easy access and it takes time because of the lack of communication between industry players and local governments which causes delays in economic growth in their regions.*

**Keywords:** *Empowerment of the Department of Industry and Trade in the Context of Developing the Tofu Industry in West Bandung Regency, Economy*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bandung Barat, selain perwujudan dari kebijakan perekonomian makro saat itu, juga didukung oleh kondisi lingkungan fisik yang bagus saat itu, lahan datarnya yang cukup luas, harga tanah yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan daerah perkotaan, serta lokasinya yang strategis berada di jalur antar Provinsi. Alih fungsi lahan inilah yang nantinya diharapkan secara perlahan-lahan dapat mengubah ruang lingkup hidup dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri. Pembangunan pabrik industri ini tersebar di dalam tiga desa yaitu antara lain Cipendeuy, Cimerang dan Cimareme. Dibangunnya kawasan industri di Kabupaten Bandung Barat ini merupakan salah satu program pembangunan yang telah dirancang oleh Kabupaten Bandung Barat yang menginginkan setiap wilayahnya memiliki fungsi dan sektor unggul yang potensinya dapat dikembangkan (Badan Pusat Statistik, 2016:4). Pembangunan di sektor industri nantinya diharapkan mampu tersebar secara merata di wilayah Indonesia yang sesuai dengan keputusan Presiden No. 98 tahun 1993 yang menjelaskan bahwa kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Dampak perkembangan industri di Kabupaten Bandung Barat juga menimbulkan perubahan terhadap kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah perubahan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa fisik, alam, dan sosial. Dengan adanya kawasan industri ini banyak memberikan dampak positif

dan dampak negatif. Dampak positifnya bagi masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya akan diuntungkan, misalnya dengan membangun Industri Kecil dan Menengah (IKM) produk barang maupun jasa seperti membuka usaha konveksi, industri tahu dan tempe, membangun warung makanan siap saji, toko kelontong, jasa angkutan dan lain sebagainya. Sektor perdagangan makanan di Kabupaten Bandung Barat secara umum mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hampir di setiap kawasan dijumpai pedagang makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor wirausaha yang banyak diminati adalah sebagai pedagang makanan dan menjadikan masyarakat mempunyai banyak alternatif dalam memilih jenis makanan yang diinginkan dengan berbagai variasi cita rasa karena konsumen selalu menginginkan hal yang baru dari bisnis IKM. Masyarakat sekitar lebih memilih untuk membeli kebutuhannya termasuk makanan.

Sepanjang tahun 2022 usaha tahu dihadapkan pada permasalahan sulitnya memperoleh bahan baku tahu dari petani maupun dari produsen lainnya. Hal tersebut terjadi sejak Juli 2022 hingga awal tahun 2023. Setidaknya hal tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas perusahaan. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan usaha tahu. Banyak perajin tahu yang kebingungan untuk mempertahankan usahanya ditengah gejolak naiknya harga kedelai yang terjadi secara terus menerus. Tidak sedikit perajin tahu yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya demi mendapatkan bahan baku yang terus menerus naik karena untuk memperoleh bahan baku yang terus menerus naik membuat mereka perlu meningkatkan modal namun karena terbatasnya modal yang mereka miliki terpaksa mereka memberhentikan sebagian pekerjanya. Selain permasalahan sulitnya mendapatkan bahan baku produksi tahu, terdapat juga permasalahan lain yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang industri tahu di Kabupaten Bandung Barat

yaitu rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Hal tersebut terkait dengan kemampuan karyawan industri tahu dalam melakukan grading dan sortasi terhadap bahan baku yang akan diproduksi, sikap karyawan terhadap menjaga kualitas produk yang akan dijual, serta kurang berhati-hati dalam memproduksi tahu.

Faktor terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi terutama permodalan, juga mempengaruhi perkembangan IKM Tahu di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut terkait terbatasnya permodalan yang dimiliki pengusaha tahu dan tidak meratanya bantuan permodalan yang diberikan Dinas Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat terhadap IKM Tahu yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan IKM Tahu di Kabupaten Bandung Barat adalah rendahnya penguasaan teknologi proses produksi dan informasi pemasaran. Dimana pada sebagian besar industri Tahu yang ada di Kabupaten Bandung Barat saat ini, masih melakukan produksi tahu dengan peralatan yang sederhana dan serba manual, seperti proses, penyaringan dan pencetakan tahu masih menggunakan alat yang sederhana. Fasilitasi pemerintahan dari berbagai aspek akan membantu memperkuat daya saing IKM. Fokus yang perlu diperhatikan adalah peningkatan manajemen usaha, fasilitasi sarana, prasarana dan permodalan, dan perluasan pangsa pasar. Fasilitasi terhadap IKM secara bertahap, akuntabel, terencana, adil dan tepat akan meningkatkan kuantitas dan kualitas IKM di Kabupaten Bandung Barat, terutama IKM Tahu. Bertitik tolak dari berbagai permasalahan yang dihadapi IKM di Kabupaten Bandung Barat seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka peran Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan iklim yang baik untuk IKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang kurang berpihak terhadap IKM sehingga pelaku IKM terhambat pada pemasaran produk serta

hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum dapat maksimal memberikan bantuan modal dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh para pelaku IKM, sehingga pelaku IKM harus berusaha sendiri untuk mencari modal dan memasarkan produknya untuk tetap bisa bertahan.

Salah satu strategi untuk mengurangi permasalahan IKM tersebut adalah dengan memulai program pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mendistribusikan pertumbuhan secara merata di seluruh daerah sesuai dengan kemampuannya. Ruang lingkup pembangunan daerah meliputi semua kegiatan pembangunan sektoral, daerah, dan khusus yang berlangsung di daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong inisiatif dan peran masyarakat untuk meningkatkan penggunaan potensi daerah, Meningkatkan dan menyelaraskan pertumbuhan antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan di wilayah tertinggal. Keberadaan industri kecil atau industri rumahan di pedesaan diyakini dapat meningkatkan produksi pangan atau komoditas dan mengatasi masalah penurunan kesempatan kerja. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Industri Kecil Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya pemberdayaan pengembangan industri kecil dan menengah diantaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pemasaran hasil produksi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan di kawasan sentra industri makanan ringan, di Kabupaten Bandung Barat. Dimana permasalahan tersebut terkait dengan harus dihadapi dan diselesaikan oleh Pemerintah daerah KBB selaku penggerak dan pengawas kegiatan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Dipandang sangat relevan dalam mengumpulkan informasi-informasi mengenai status suatu gejala yang ada sesuai keadaan yang sebenarnya di lapangan, penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang digunakan oleh peneliti, untuk mendeskripsikan tentang fenomena dilapangan dan difokuskan pada pemberdayaan Pengembangan Pembangunan Perekonomian melalui industri kecil dan menengah di Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 tahap pemberdayaan yaitu tahap Inisial, partisipasi dan emansipatoris. sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian, yakni mendeskripsikan secara detail fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan, merupakan alasan akademis mengapa peneliti menentukan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif tampil lebih selaras dengan tema penelitian yang sudah ditetapkan. Penetapan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat sebagai pelaksana yang bertanggung jawab sebagai pengembangan pembangunan industri dan masyarakat sebagai objek yang diteliti sebagai akibat dari pembangunan perindustrian tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan terdiri dari: Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung Barat sebagai pelaksana yang bertanggung jawab sebagai pengembangan pembangunan industri dan Industri Kecil sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan IKM di Kabupaten Bandung Barat dan Menengah di Kabupaten Bandung Barat serta masyarakat sebagai objek yang diteliti sebagai akibat dari pembangunan perindustrian tersebut. Peneliti melakukan penelitian melalui wawancara untuk memperoleh informasi dan data mengenai Pemberdayaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di

Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dokumentasi dan gabungan dari ketiganya (Sugiyono, 2015:244). Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan studi pustaka dengan mengambil teori-teori dari beberapa referensi-referensi atau rujukan yang sudah diakui, sudi lapangan mengumpulkan sebuah data yaitu dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi) yaitu dilakukan secara langsung, dan dokumentasi sebagai pelengkap dari penelitian kualitatif mengenai Pemberdayaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat. “Aktifitas dalam analisis data yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi” Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015 : 246). Proses analisis data yang dapat diuraikan yaitu; pertama yang harus dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan data, dengan menggunakan analisis terhadap studi pendahuluan dari beberapa buku, literatur atau dari data sekunder yang telah ada sebelumnya maupun dengan menggunakan data primer seperti hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, kedua, melakukan reduksi data yang telah terkumpul dengan merangkum hal-hal pokok, yaitu dengan memilih hal yang penting, ketiga mereduksi data kemudian penyajian data dilakukan peneliti dalam bentuk tulisan sebagai sekumpulan informasi-informasi yang sudah tersusun dan akan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan maupun pengambilan tindakan selanjutnya dan Setelah dilakukan pengumpulan data, reduksi data dan data tersebut sudah disajikan maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang dilakukan secara bersamaan untuk mempermudah proses dari analisis data dan waktu penelitian dapat lebih efektif dengan memberikan gambaran yang

jelas bagi peneliti mengenai Pemberdayaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat.

## **PEMBAHASAN**

Pada tahun 2022 dan 2023 penjualan Tahu pada 25 pengusaha UMKM Tahu Di Kabupaten Bandung Barat mengalami adanya kenaikan dan penurunan penjualan yang tidak menentu. Penjualan UMKM Tahu tahun 2022 dan 2023 pada 25 pengusaha Tahu penjualan kurang maksimal dan permintaan produksi tahu ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan penjualan. Kondisi tersebut tergambarkan dalam hasil penjualan dan pendapatan UMKM Tahu Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan maupun penurunan Hal ini berdampak dari tidak tercapainya target penjualan UMKM Tahu. Selain permasalahan sulitnya mendapatkan bahan baku produksi tahu, terdapat juga permasalahan lain yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang industri tahu di Kabupaten Bandung Barat yaitu rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Hal tersebut terkait dengan kemampuan karyawan insdustri tahu dalam melakukan grading dan sortasi terhadap bahan baku yang akan diproduksi, sikap karyawan terhadap menjaga kualitas produk yang akan dijual, serta kurang berhati-hati dalam memproduksi tahu. Dengan adanya Penurunan industri kecil dan menengah Tahu memberikan dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dan penurunan yang terjadi pada industri kecil dan menengah Tahu di Kabupaten Bandung Barat ini perlu untuk mendapatkan suatu pemberdayaan. Sehingga usaha industri Tahu dapat meningkatkan produksinya dan dapat berdampak baik terhadap penyerapan tenaga kerja dan dapat meminimalisir angka pengangguran di Kabupaten Bandung Barat dan untuk itu diperlukan suatu kebijakan sektoral, untuk dapat mengembangkan pemberdayaan

UMKM Industri Tahu di KBB peneliti menggunakan teori Hafsah (2004:43) bahwa dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah harus memperhatikan 8 elemen diantaranya sebagai berikut.

## **Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat**

### **1) Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif**

Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya industri tahu, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing UMKM Industri Tahu di Kabupaten Bandung Barat dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM Industri Tahu tidak berada pada suatu instansi tertentu, dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi UMKM Industri Tahu. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan UMKM mampu bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi makro, kerjasama lintas sektor dan kebijakan pembangunan daerah, serta perijinan yang bersifat lintas sektoral.

### **2) Bantuan Permodalan**

Peran Disperindag Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan kebijakan UMKM industri tahu, belakangan ini sudah terbilang baik, tetapi belum maksimal dan merata. Hal ini terlihat dengan adanya bantuan modal, fasilitas serta pembinaan yang belum merata kesemua pelaku usaha industri tahu yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Sebagian besar pelaku usaha

tahu mengatakan jarang bahkan tidak pernah mengikuti pameran sebagai wadah untuk mempromosikan produk UMKM tahunya, berarti tidak adanya kerjasama maupun interaksi dan komunikasi yang baik. Dalam hal permodalan untuk industri Tahu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ikut membantu akan tetapi dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat memberikan bantuan modal dalam bentuk uang karena kewenangan pemberian modal bagi UMKM di Kabupaten Bandung Barat merupakan kewenangan Dinas Keuangan dan Koperasi Kabupaten Bandung Barat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat khususnya UMKM Industri Tahu masih memerlukan tambahan modal yang cukup banyak untuk mengembangkan usaha.

### **3) Perlindungan Usaha**

Usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang peraturan pemerintah yang saling menguntungkan. Untuk itu Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) perlu dilakukan terhadap produk Tahu dari UMKM Tahu di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini, memiliki nilai jual yang tinggi, dikarenakan adanya bahan alami yang digunakan dalam memproduksi tahu serta produk tahu tersebut menjadi tidak dapat dicuri oleh pihak lain apabila terlindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI) dan tidak dapat di klaim oleh kepemilikan usaha lain. Mengingat pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) tersebut upaya telah dilakukan diantaranya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, dengan mendampingi para pelaku UMKM untuk mematenkan nama industri tahu yang dipasarkan, bahkan Disperindag KBB juga telah banyak mendampingi pelaku UMKM Tahu di Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan sertifikasi Halal dari BPOM dan Departemen Agama. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan UMKM agar dapat melanjutkan serta dukungan akses permodalan dan

bantuan dalam mendaftarkan merek. Disamping itu juga harus adanya peran pendampingan yang dapat membantu bagi para pelaku UMKM, UMKM, UKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat terutama pada UMKM Tahu.

#### **4) Pengembangan Kemitraan**

Pemberdayaan UMKM industri tahu di Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bandung Barat. Mekanisme pengembangan kemitraan UMKM dilaksanakan dengan langkah- langkah yang sistematis yaitu dimulai dengan tahap pemetaan atau indikasi dan dilanjutkan dengan tahap penjajagan kemitraan. Berdasarkan hasil evaluasi Disperindag Kabupaten Bandung Barat, diantara beberapa kendala pelaku UMKM Makanan dan minuman khususnya industri tahu untuk dapat mengembangkan usahanya yaitu diantaranya masalah legalitas dan sertifikat halal produk tahu yang dipasarkan. Mengenalkan dan memasarkan produk UMKM dan memperbaiki produk UMKM, dengan melakukan pendampingan. Dalam pengembangan kemitraan Disperindag melakukan pengidentifikan kepada pelaku UMKM meliputi; proses identifikasi dan profiling pelaku usaha mulai dari jenis usaha, berapa tahun menjalankan usaha, dan lain lainnya, berkaitan motivasi mendirikan usaha, karena tujuan orang membangun usaha itu berbeda-beda, berkaitan dengan legalitas produk, bantuan permodalan melalui strategi kemitraan dengan melibatkan pihak lain yaitu kerjasama berupa kemitraan dan pemasaran produk dan terakhir manajemen keuangan yang perlu dimiliki pelaku UMKM. Kemudian dalam penguatan potensi yang dimiliki pelaku UMKM yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bandung Barat, pada tahap selanjutnya berupa tindakan spesifik yang melibatkan pemberian banyak masukan (input) dan memberikan anggota masyarakat akses ke berbagai kemungkinan yang akan memberdayakan mereka. Selain program pelatihan, Dinas juga menyediakan kegiatan seperti Bimtek (Bimbingan Teknis) atau Workshop serta

membantu para pelaku UMKM tahu dalam mengelola limbah tahu dengan melakukan AMDAL. Selain program pelatihan, Dinas juga menyediakan kegiatan seperti bimbingan teknis atau *workshop*.

### 1) **Pelatihan**

Salah satu upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM dalam rangka pengembangan industri Tahu di Kabupaten Bandung Barat adalah dengan memberikan pelatihan untuk UMKM baik dalam aspek kewiraswataan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Upaya yang dilakukan Disperindag Bandung Barat dengan membuat program pelatihan bagi UMKM. Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya sedangkan bagi para calon pelaku usaha untuk memberikan ide usaha sehingga diharapkan menjadi pelaku usaha. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan pelatihan yakni susunan dan rincian tugas tim seleksi dan rekrutmen, susunan dan rincian tugas pelaksana dan instruktur, waktu pelaksanaan, jenis kegiatan pelatihan yang dibuka, dan unit kompetensi. Adapun sosialisasi program pelatihan yang dilakukan oleh Disperindag adalah melalui media elektronik, mediaonline dan sosialisasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di kecamatan maupun desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa dan Kecamatan yang berada Kabupaen Bandung Barat.

### 2) **Membentuk Lembaga Khusus**

Pembentukan lembaga khusus bagi pengembangan UMKM bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh kembangkan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM. Lembaga khusus Koperasi UMKM bersama Disperindag dan

pengurus UMKM Tahu Kabupaten Bandung Barat melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM yang berhak menerima bantuan modal. Pendampingan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut terkait bantuan modal atau kredit lunak. Pihak Disperindag juga membantu pelaku UMKM dalam mengisi kuesioner. Selanjutnya Koperasi UMKM dan Disperindag Kabupaten Bandung Barat melakukan verifikasi lebih dalam terkait penerima bantuan modal apakah masyarakat pelaku usaha UMKM sesuai dengan standar atau kriteria, serta nama-nama pelaku UMKM tersebut harus sudah terdaftar dalam UMKM Kabupaten Bandung Barat.

### **3) Memantapkan Asosiasi**

Asosiasi UMKM merupakan perkumpulan para pelaku usaha yang memiliki kepentingan yang sama sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan yang melibatkan seluruh pancaindra. Dengan adanya peran asosiasi UMKM Industri Tahu yang sangat strategis, tentu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan pelaku UMKM Industri Tahu di Kabupaten Bandung Barat. Agar peran tersebut dapat berfungsi optimal, dukungan dari berbagai pihak sangat penting khususnya pemerintah. Dengan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung peran asosiasi UMKM, tentu akan meningkatkan kontribusi pelaku UMKM bagi perekonomian Daerah.

### **4) Mengembangkan Promosi**

Kegiatan promosi ini harus dapat dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran serta diarahkan dan dikendalikan dengan baik sehingga promosi tersebut benar-benar dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam upaya meningkatkan volume penjualan. Peran Disperindag terhadap pengembangan promosi tahu yang diproduksi oleh UMKM Industri Tahu Kabupaten Bandung Barat sudah baik dan diharapkan tingkat penjualan Tahu yang diproduksi UMKM Kabupaten Bandung Barat dapat terus

meningkat dan pada akhirnya dengan semakin meningkatnya hasil penjualan tahu produksi UMKM akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku serta dapat meningkatkan perkembangan dan kemajuan pada perekonomian daerah.

## **Faktor- faktor Penghambat Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat**

### **1) Keterbatasan Permodalan**

Permodalan adalah faktor utama yang diperlukan dalam pengembangan sebuah usaha. Bagi usaha tahu permodalan masih merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengembangan usahanya. Untuk mendirikan usahanya, pelaku UMKM tahu tersebut harus menggunakan uangnya sendiri dikarenakan belum bisa meminjam di bank. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan dari perbankan yang mengharuskan sebuah usaha apabila ingin mengajukan kredit melalui perbankan harus memiliki sistem pembukuan dengan standar yang telah ditentukan oleh perbankan. Selain itu, untuk mengajukan kredit dilihat juga dari minimal melakukan usaha secara aktif yaitu suatu usaha harus sudah bergerak melakukan usaha secara aktif selama 6 bulan.

### **2) Permasalahan Teknik**

Permasalahan yang biasa dihadapi usaha mikro adalah permasalahan teknis yang berputar pada teknik pemasaran ataupun promosi produk, permasalahan yang sama juga dihadapi oleh para pelaku UMKM terutama UMKM Industri Tahu. Lebih lanjut mengenai permasalahan pemasaran atau promosi produk dengan menitipkan produk Tahu masih ada yang menggunakan cara konvensional yaitu seperti dengan menitipkan Tahu di Pedagang-pedagang pasar dan dikenalkan serta dijual dengan memanfaatkan pedagang keliling pedesaan dan pertokoan dengan menggunakan motor.

## **Upaya yang dilakukan Dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat**

### **1) Adanya Lembaga Khusus dan Asosiasi**

Salah satu faktor pendukung dalam pengembangan pemberdayaan UMKM Industri Tahu yang dilakukan Oleh Disperindag Kabupaten Bandung Barat adalah melakukan kolaborasi bersama Dinas lain dan pihak swasta dengan membentuk lembaga khusus yang membantu UMKM di bidang permodalan yaitu melakukan kerjasama bersama Dinas Koperasi dengan membentuk Koperasi UMKM Kabupaten Bandung Barat. Selain itu Disperindag Kabupaten Bandung Barat membantu para pelaku UMKM Tahu dalam membentuk dan membina asosiasi UMKM Industri Tahu yang menaungi para pelaku usaha mikro Tahu di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya asosiasi UMKM industri tahu tersebut maka dapat mempermudah penyebaran informasi tentang bantuan modal, penyelenggaraan pelatihan, promosi, pendampingan sertifikasi halal, pembuatan HKI dan informasi-informasi penting lainnya dari Disperindag kepada pelaku UMKM Industri Tahu yang berada di wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat.

### **2) Dukungan dari Instansi- Instansi Lainnya**

Pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh Disperindag, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pihak lain dalam membantu pemberdayaan UMKM tersebut. Salah satu instansi yang mendukung pengembangan UMKM Industri Tahu adalah Dinas Koperasi Kabupaten Bandung Barat yang turut serta memberikan bantuan permodalan kepada Pelaku UMKM Industri Tahu. Dinas lain yang turut mendukung pengembangan pemberdayaan Industri Tahu Kabupaten Bandung Barat adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang membantu Disperindag dalam memberikan bantuan kepada UMKM Industri Tahu dalam pengelolaan limbah tahu dan melakukan AMDAL. Pihak swasta yang juga turut membantu pengembangan UMKM

Industri Tahu adalah, pihak swasta seperti retail-retail kuliner, toko oleh-oleh khas Kabupaten Bandung Barat, toko online dan super market yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang membantu UMKM Industri Tahu menjual produknya.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang bisa penulis tarik berdasarkan hasil mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian menganalisis data sesuai dengan aktivitas yang telah ditentukan serta menguji keabsahan data yang peneliti paparkan, maka secara keseluruhan dalam penelitian mengenai pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pengembangan industri tahu di Kabupaten Bandung Barat yakni; pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) industri tahu, yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Bandung Barat adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM Tahu di Kabupaten Bandung Barat dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kedua, peran pemerintah daerah khususnya Disperindag Kabupaten Bandung Barat masih perlu untuk terus ditingkatkan, meskipun sudah banyak pelaku UMKM Tahu, yang mendapatkan bantuan permodalan, meskipun permodalan yang diberikan tidak selalu dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk bantuan lain seperti memfasilitasi alat produksi yang dibutuhkan, dan memberikan bantuan pada pelaku UMKM Tahu dalam melakukan pengelolaan limbah Tahu serta membantu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) Industri Tahu. Ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, dengan mendampingi para pelaku UMKM untuk mematenkan nama industri tahu yang dipasarkan, bahkan Disperindag KBB juga telah banyak mendampingi pelaku UMKM Tahu di KBB untuk mendapatkan

sertifikasi Halal dari BPOM dan Departemen Agama. Keempat, upaya pengembangan Pemberdayaan UMKM Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Disperindag KBB adalah dengan melakukan kemitraan berupa kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti perguruan tinggi maupun marketplace. Kelima, Disperindag Kabupaten Bandung Barat membuat dan melaksanakan program-program pelatihan bagi UMKM berupa pelatihan tentang kewiraswataan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Keenam, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah membentuk 2 lembaga khusus untuk membantu meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung Barat, yang pertama melalui Dinas Koperasi membentuk Lembaga Keuangan Mikro yaitu Koperasi UMKM Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga yang memberikan bantuan permodalan bagi UMKM dan yang kedua membentuk lembaga khusus berupa Asosiasi UMKM Industri Tahu yang dibentuk dan dibina langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat. Ketujuh, peran asosiasi UMKM Industri Tahu di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM Industri Tahu dan keberadaannya sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM Industri Tahu di Kabupaten Bandung Barat. Kedelapan, strategi yang dilakukan oleh Disperindag adalah memanfaatkan aplikasi online dan menyelenggarakan pameran produk-produk UMKM Kabupaten Bandung Barat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan media sosial bagi pengembangan pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di Kota Surakarta). *Dutacom*, 9(1), 43-43.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*

Negara, 5(2), 8-21.

Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.

Faizal, F. (2015). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 35-51.

Koperasi, D. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil*. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mahendrawati Nanih dan Syafe'i Agus Ahmad. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardikanto Totok Dan Soebianto Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*, Bandung: Alfabeta.

Nuryanti, D. A. F. P., & Sumertayasa, P. G. A. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Hubungan Industrial. *Kertha Semaya: Journal Hukum*, 2.

Nasution, M. P., & Suryadi, S. (2019). Keterkaitan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *INFORMATIKA*, 7(1), 17-22.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Satria, A. (2015). Materi Ekonomi: Teori Industry Menurut Para Ahli Dan Pengelompokannya. On-Line) Tersedia Di: [www.Materibelajar. Id/2015/12/Materi-Ekonomi-Teori-Industri-Menurut. Html](http://www.Materibelajar.Id/2015/12/Materi-Ekonomi-Teori-Industri-Menurut.Html).

Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).

Sidauruk, R. (2013). Peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(3), 141-157.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Kepres (Keputusan Presiden) No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Kawasan Industri